URGENSI INTEGRITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Nabiila Husna Iailiya R,¹ Tatu Amalia,² Abdun Nashir Humaid,³ Nurlaili Rahmawati⁴

¹²³⁴Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: ¹Nabila.husna21@mhs.uinjkt.ac.id, ²tatu.amalia21@mhs.uinjkt.ac.id,

³abdunio.hans3321@mhs.uinjkt.ac.id, ⁴rnurlaili086@uinjkt.ac.id

Abstrak, Banyaknya kabar yang beredar mengenai kinerja dan etos kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di berbagai pemberitaan media hingga razia oleh satpol PP sehingga artikel ini bertujuan untuk membahas urgensi integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. ASN sebagai aparatur pemerintah yang sudah disumpah ketika menerima jabatan harus mempunyai komitmen tinggi untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa setiap PNS maupun PPPK harus memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas. Pelayanan yang baik akan menjadi indikator bagi pemerintahan yang baik, jika pemerintahan yang baik maka kesejahteraan masyarakat pun akan tercapai.

Kata Kunci : Integritas ASN, Aparatur Sipil Negara, Pemerintahan Yang Baik.

Abstract, There is a lot of news circulating regarding the performance and work ethic of the State Civil Apparatus (ASN) in various media reports to raids by Satpol PP, so this article aims to discuss the urgency of the integrity of the State Civil Apparatus (ASN) to create good governance. ASN as government officials who have been sworn in when accepting a position must have a high commitment to carry out their duties and obligations as well as possible. Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus emphasizes that every PNS and PPPK must have high integrity in carrying out their duties. Good service will be an indicator for good governance, if good governance then the welfare of society will be achieved.

Keywords: ASN Integrity, State Civil Apparatus, Good Governance.

Pendahuluan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di negara Indonesia. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki tanggung jawab guna mewujudkan visi dan misi negara serta menjaga kepercayaan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, PNS dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara (ASN) menyebutkan bahwa perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas.¹ Integritas merupakan konsistensi atau tidak berubah antara nilai-nilai, perilaku, sikap, dan hasil yang ditunjukkan oleh seseorang atau organisasi. Integritas mencerminkan kesesuaian antara apa yang dikatakan dan dilakukan yang sesuai dengan norma-norma etika dan profesional. Integritas juga berarti anti korupsi, kolusi (kerja sama secara rahasia yang dilakukan antara dua orang atau lebih dengan tujuan merugikan orang lain atau negara atau masyarakat), nepotisme (lebih mengutamakan sanak saudara terutama dalam memegang pemerintahan), penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran lainnya yang dapat merugikan kepentingan publik atau warga negara.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pekerjaan yang hampir diminati oleh setiap orang, kebanyakan orang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan banyaknya hal yang menarik di dalam pekerjaan tersebut, seperti: gaji, biaya tunjangan, dan jaminan ketika sudah pensiun nantinya.

Tidak sedikit yang beranggapan bahwa kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) sangatlah mudah yang hanya perlu datang setelah jam makan siang dan pulang dalam waktu yang sebentar. Tentu saja Pegawai Negeri Sipil (PNS) bukanlah profesi yang mudah, hal tersebut merupakan kabar miring yang sering beredar di kalangan masyarakat. Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), setidaknya mereka nanti akan disumpah untuk menjalankan pekerjaan dan melayani masyarakat dengan baik. Bahkan, sekarang pemerintah Indonesia sudah melakukan razia secara berkala untuk menjaring Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menaati peraturan. Seperti, kunjungan dadakan yang akan dilakukan untuk mengetahui berapa banyak Pegawai Negeri sipil (PNS) yang tidak ada di tempat tanpa alasan yang jelas. Seperti berita yang beredar di berita online bahwa 33 PNS Pemprov Sumsel terjaring razia yang berkeliaran di mall saat jam kerja.²

Ada pula kabar yang beredar, apabila mempunyai kerabat, teman maupun keluarga yang juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka akan lebih mudah untuk masuk sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).³ Oleh karena itu, anggapan mereka yang mempunyai koneksi nantinya tidak harus susah payah untuk belajar dan berusaha agar lolos seleksi ujian Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal tersebut merupakan bukan fakta yang

¹Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

² [Jam Kerja Keluyuran, 33 PNS Pemprov Kena Razia \(jpnn.com\)](https://www.jpnn.com) diakses pada tanggal 28 Mei 2023

³ [Mitos dan Fakta Seputar PNS - Cek Fakta Liputan6.com](https://liputan6.com) diakses pada tanggal 28 Mei 2023

terjadi sebenarnya di lapangan. Karena ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sendiri digelar menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang akan menampilkan hasil ujian setelah selesai mengerjakan soal ujian tersebut. Sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sekarang sudah sangat transparan dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Oleh karena itu, agar bisa lulus ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), maka peserta harus melewati beberapa tahapan yang ujiannya sangat transparan tersebut.

Dan ada pula kabar tentang pekerja kontrak yang sangat mudah diputuskan kontrak perjanjian kerjanya secara sepihak. Namun, bagi mereka yang berada atas perlindungan negara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), kabarnya PNS tidak akan mengalami masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan menjamin status profesi tersebut walaupun melakukan kesalahan. Hukuman paling berat yang mungkin akan dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanyalah mutasi pekerjaan, jika telah dinyatakan melanggar peraturan dan melakukan kesalahan. Hal ini merupakan pemikiran yang tidak benar berkembang di kalangan masyarakat. Faktanya, kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan terus dipantau dan diperbaiki oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Bahkan, kesalahan sepele yang biasa dilakukan oleh para Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti, dahulu yang jarang masuk kerja bisa menyebabkan hilangnya jabatan. Sekarang, tidak sedikit berita yang beredar menyatakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kehilangan pekerjaan mereka yang akan diberhentikan hanya karena jarang masuk kerja. Bahkan, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan kesalahan berat pun akan diproses sama dengan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, tidak ada hukuman yang tidak diberikan atas kesalahan apapun.

Oleh karena itu, urgensi integritas Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sangatlah penting dikarenakan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik, menjamin hak-hak warga negara, dan mencegah adanya perilaku korupsi serta penyalahgunaan wewenang.

Metode Penelitian

Fokus penelitian ini terkait pentingnya integritas PNS untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Dengan menggunakan jenis penelitian *library research* dengan pendekatan kasus (*cases approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data diperoleh dengan mengumpulkan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, serta dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta bahan sekunder dari buku dan jurnal.

Hasil Dan Pembahasan

a. Pengertian Integritas

Integritas mempunyai istilah yang bermacam-macam, dalam bahasa Inggris disebut *integrity*, sedangkan dalam bahasa Latin disebut "*inter*", "*integer*", "*integra*" yang berarti lengkap, utuh. Hal ini menunjukkan dalam konsep integritas merupakan suatu kondisi di mana tidak ada bagian yang kurang atau hilang, dan harus lengkap, utuh atau sempurna.⁴ Seseorang dikatakan berintegritas apabila memiliki semuanya atau lengkap, utuh, tidak ada bagian yang hilang. Integritas merupakan kemampuan seorang untuk mengendalikan dirinya sedemikian rupa saat kondisi tidak mengenakkan, melakukan pekerjaan dengan bagus, memberikan yang terbaik bagi dirinya dan integritas tidak ditunjukkan untuk mendapatkan penghargaan ataupun untuk pencitraan atau kepentingan diri sendiri, tetapi murni ditunjukkan untuk memberikan sesuatu yang terbaik.

Integritas juga dapat diartikan bagaimana seseorang yang mencerminkan dirinya didalam suatu kelompok yang dapat dilihat dari sikap dan perbuatan, dan integritas dapat dilihat juga dari kekonsistenan dalam pemilihan kata maupun prinsip yang diyakininya. Ada beberapa orang yang sering berkata manis namun tidak sesuai dengan keinginan dan pemikirannya. Seseorang yang berintegritas tinggi akan berpikir terlebih dahulu, mengelola kata apa yang akan dilontarkannya kemudian mengucapkannya diantara perbuatan dan pengucapannya sesuai dengan prinsipnya. Integritas seseorang di uji dengan berbagai macam cobaan, seperti : wanita, uang, jabatan, keluarga, dan lain-lain.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nilai integritas merupakan mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Dan unsur integritas dalam KBBI, yaitu kemampuan yang memancarkan kewibawaan" tidak secara spesifik menyebut nilai-nilai tertentu, hal ini mengandung makna orang yang memiliki banyak nilai-nilai. Sebagaimana orang yang berwibawa sebagai berikut:⁶

1. Orang memiliki ketaatan terhadap norma,
2. Disiplin,
3. Memiliki kecerdasan,
4. Bertanggung jawab, dan lain-lain.

Adapun nilai-nilai berintegritas, sebagai berikut:

1) Kejujuran

Salah satu nilai orang yang berintegritas adalah kejujuran. Orang yang berintegritas merupakan orang yang berperilaku jujur. Dalam KBBI kejujuran berasal dari kata dasar jujur yang artinya lurus hati, tulus atau ikhlas tidak berbohong, tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. Dari definisi tersebut kejujuran meliputi:

⁴Suyono. Kajian Literatur: Konsep Integritas Bagi ASN. Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Vol 2, No. 3, Juli 2022, h. 252

⁵Juwianto, Joko. (2014). Penerima Layanan. Jakarta: Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

⁶U. Sutisna. Pengaruh Kewibawaan Guru PAI Terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK Al-Kautsar. Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 3 (2). H, 172

- Tulus atau ikhlas, adalah ketulusan hati dalam melaksanakan suatu amal yang baik, yang semata-mata karena Allah SWT, tanpa mengharapkan sesuatu yang lain.
- Mengikuti aturan yang berlaku atau tidak curang dan apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya.
- Tidak berbohong atau jujur dalam berkata atau memberikan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Kejujuran juga dapat diartikan sebagai menepati janji ataupun menepati kesanggupan, baik yang telah terlahir dalam kata-kata maupun yang masih didalam hati.⁷

2) Norma

Nilai kedua dalam integritas merupakan norma, ⁸Dalam KBBI, norma merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima.

Norma juga merupakan sebagai patokan perilaku seseorang dalam satu kelompok tertentu, yang dapat memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya akan dinilai oleh orang lain, dan norma juga merupakan perwujudan dari nilai karena setiap norma pasti mengandung nilai, nilai sekaligus menjadi sumber norma. Norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku orang lain, dan norma dalam perilaku mencakup 4 kategori, yaitu norma agama, norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum.⁹

3) Etika dan kode etik

Nilai ketiga dalam integritas merupakan etika atau kode etik. Orang yang berintegritas selalu mematuhi etika atau kode etik. Etika merupakan suatu susunan prinsip-prinsip moral dan nilai yang diakui dan diterima oleh individu atau suatu kelompok sosial sebagai sesuatu yang mengatur dan mengendalikan tingkah laku serta menentukan hal baik dan buruk untuk dilakukan.¹⁰ Sedangkan dalam KBBI, kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.

4) Moral

Nilai keempat dalam integritas merupakan nilai moral, orang yang berintegritas selalu berpegang teguh dengan nilai moral. Dalam KBBI, moral merupakan ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak, budi pekerti, susila. Moral dan etika memiliki arti yang sama, etika

⁷Sulastri, S., & Simarmata, M. Y. (2019). Penanaman Nilai Pendidikan Karakter Jujur dalam Aspek Keterampilan Berbicara dan Menulis. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia II* (Vol. 2, pp. 108-110). FBS Unimed Press.

⁸Garmo, John. (2013). *Pengembangan Karakter untuk Anak: Panduan Pendidik*. Jakarta: Penerbit Kesainc Blanc.

⁹Anwar, S. (2016). Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(1), 141-167.

¹⁰Susanty, Y. (2020). Penerapan Etika Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 14(1), 80-95

berasal dari bahasa latin "*ethos*" dan moral berasal dari bahasa latin "*mos*" atau "*mores*" yang artinya adat kebiasaan. Moral dan etika merupakan perilaku yang baik dari seseorang atau sekelompok orang sebagai tuntunan hati nurani untuk terciptanya keadilan dalam masyarakat.¹¹ Namun jika dibandingkan dengan etika, secara umum moral menekankan kepada karakter dan sifat-sifat individu yang khusus di luar ketaatan kepada peraturan. Moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan yang kesemuanya tidak terdapat dalam peraturan-peraturan hukum, misalnya kemurahan hati, kebesaran jiwa, rasa kasih, keikhlasan, kepedulian, dan lainnya. Sedangkan etika merupakan standar atau kriteria menyatakan benar atau salah, dan moral adalah tindakan yang dapat dikategorikan benar atau salah.¹²

5) Anti korupsi

Konsep integritas dikontraskan dengan korupsi, artinya orang yang berintegritas mencerminkan perilaku anti korupsi. Perilaku integritas menpresentasikan sikap-sikap antikorupsi. Orang yang memiliki integritas, bersikap tidak mendukung perilaku korupsi, sikap yang anti terhadap segala bentuk tindakan korupsi. Karakter integritas dan budaya integritas secara langsung bertentangan dengan korupsi. Integritas merupakan suatu keutamaan, dapat mendorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Hal ini jelas bertentangan dengan korupsi, karena korupsi merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi kebaikan bersama demi kepentingan pribadi tertentu.¹³ Selanjutnya, sikap antikorupsi ini ditunjukkan dengan sikap jujur, mandiri, peduli, sederhana, kerja keras, tanggungjawab, berani, dan adil.¹⁴

Oleh karena itu, integritas merupakan konsisten, kesesuaian, koherensi, keselarasan dalam niat, pikiran, kebiasaan, perkataan, perbuatan, tindakan karakter dengan seluruh nilai yaitu nilai kejujuran, nilai-nilai moral, etik dan kode etik, serta sikap antikorupsi. Orang yang berintegritas harus menunjukkan seluruh unsur tersebut sehingga mencerminkan sebuah kesempurnaan, keutuhan, kelengkapannya ada satupun unsur yang kurang atau hilang.

b. Tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam UU Nomor 5 Tahun 2014

Pengertian Aparatur Sipil Negara yang dulunya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil di kemukakan oleh beberapa ahli. Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil, seperti A.W.Widjaja, mendefinisikan bahwa pegawai merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan. Oleh karena itu, menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa

¹¹Yuwono, I. D. (2013). Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan. Yogyakarta: Media Pressindo

¹²Mardapi, D. (2011). Penilaian Pendidikan Karakter. Bahan Tulisan Penilaian Pendidikan Karakter UNY. Yogyakarta

¹³Endro. Gunardi. (2017). Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi. Universitas Bakrie. Jurnal Integritas Volume 3, Nomor 1, Maret 2017

¹⁴Abdul, K. (2022). Anti Korupsi dan Integritas. Bandung: Penerbit CV. Media Sain Indonesia.

Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.¹⁵

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai negeri sipil menurut Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (2) tentang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai negeri sipil menurut Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 1 Angka (3) yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Negeri Sipil, Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, "Pegawai " berarti "orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan "Negeri" berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara.

A. Jenis- jenis Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jenis Pegawai Negeri Sipil Negara dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Pegawai Negeri Sipil:

Pada Pasal 7 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:

Pada pasal 7 Angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dalam perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

B. Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2014 Pasal 23 ditetapkan bahwa kewajiban pegawai ASN sebagai berikut:

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.

¹⁵A. W. Widjaja, 2006, Administrasi Kepegawaian, Jakarta: Rajawali, hlm. 113

2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
5. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
6. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Fungsi, Tugas, dan Peran Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2014 Pasal 10, 11, dan 12 ditetapkan bahwa fungsi, tugas, dan peran pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

Pegawai ASN berfungsi sebagai Pelaksana kebijakan publik, Pelayan publik, dan Perekat dan pemersatu bangsa.¹⁶ Secara umum, ASN bertugas untuk: *Pertama*, Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; *kedua*, Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan *ketiga*, Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁷

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁸

c. Pemerintahan yang Baik

Pemerintah dianggap baik ketika menciptakan kebijakan yang melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan rakyat. Karena suatu pemerintahan bisa baik, tidak hanya dipengaruhi oleh keadaan pemerintahan yang meliputi seluruh wakil rakyat. Namun juga dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri dan pihak swasta, seperti industri dan perusahaan swasta.

Dalam prakteknya, membangun pemerintahan yang baik tidaklah mudah. Karena butuh dukungan dari banyak pihak baik pemerintah, aparatur pemerintah, dan rakyat harus saling berkolaborasi. Dimana semua ingin berguna dan menghadirkan kebijakan yang adil bagi masyarakat luas.

¹⁶ Pada pasal 10 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.

¹⁷ Pada Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.

¹⁸ Pada Pasal 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014.

Sayangnya, tidak sedikit pemerintahan yang salah jalan karena beberapa pihak masih fokus pada kepentingan pribadi. Akibatnya Perubahan menjadi pemerintahan yang baik kemudian semakin terjal dan tentunya memakan waktu yang lebih lama.¹⁹

Pemerintah yang diberikan kewenangan secara *freies ermessen*, maka dimungkinkan dalam menjalankan tugasnya ada perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku serta menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan perlindungan hukum bagi masyarakat, maka pada tahun 1950 panitia de Monchy di Netherland membuat laporan tentang azas-azas umum pemerintahan yang baik.²⁰

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah tanggung jawab umum untuk berbagai hal yang ada dalam pemerintahan. Oleh karena itu, negara harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang diatur oleh peraturan dan perundang-undang.

b. Independensi

Independensi adalah negara yang netral dan tidak memihak kepada pihak manapun. Namun, pemerintah harus bisa memilih untuk berpihak pada pilihan yang menguntungkan bagi negara. Jadi, hubungan antara pemerintah, masyarakat dan swasta saling berhubungan dan menemukan pilihan yang tepat untuk keluar dari masalah tersebut.

c. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah terhadap segala informasi dan rencana pembangunan nasional. Tujuan transparansi adalah agar masyarakat dapat memantau tindakan pemerintah dan mengevaluasi kinerja pemerintah.

d. Partisipasi

Partisipasi adalah anggota pemerintah yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan negara. Selain itu, rakyat berhak untuk menyalurkan aspirasi atau pendapatnya tentang kebijakan pemerintah, karena kepentingan dan kesejahteraan rakyat harus diutamakan dalam kebijakan pemerintah.

e. Koordinasi

Koordinasi adalah komunikasi yang lancar sehingga kita dapat bekerja sama untuk memantapkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik dan efektif dalam pembangunan nasional²¹.

Indonesia dengan ketatanegaraannya melibatkan berbagai pihak dalam pemerintahannya, seperti pejabat dan pegawai negeri sipil, serta masyarakat secara

¹⁹<https://deepublishstore.com/blog/good-governance/> Diakses pada tanggal 7/5/2023, pukul 23:30PM.

²⁰ SF. Marbun, "Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara", (Yogyakarta: Liberty, 2011), hlm. 57

²¹<https://bobo.grid.id/read/083597792/5-ciri-dan-karakteristik-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik?page=all>. Diakses pada tanggal 7/5/2023, pukul 17:15 PM.

keseluruhan. Kekuasaan badan dan atau pejabat pemerintah bukannya tidak terbatas, tetapi harus sesuai pada peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan. Dalam kaitan ini, terdapat asas dan aturan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan atau tindakan. Oleh karena itu, menarik untuk memahami asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas penyelenggaraan negara Indonesia²².

Pemerintah diberi kewajiban untuk melaksanakan kepentingan bersama, sehingga pemerintah diberi kekuasaan untuk mengintervensi semua kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Segala tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pewujudan asas legalitas yang merupakan landasan utama negara hukum. Namun, keaktifan pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum harus selalu mengikuti asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem pemerintahan Indonesia dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan stabil.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, menguraikan tentang ruang lingkup asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berlaku dalam administrasi negara. Asas-asas umum tata pemerintahan yang baik yang dimaksud meliputi asas-asas:

- 1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang dijadikan patokan oleh seluruh warga negara. Sehingga akan menciptakan keadilan, keajegan, dan tanpa pandang bulu.
- 2) Kemanfaatan, yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus memperhatikan manfaat bagi kepentingan individu, masyarakat, kepentingan generasi yang akan datang serta kepentingan ekosistem.
- 3) Ketidak berpihakkan, yaitu asas yang mewajibkan lembaga dan/atau pejabat negara untuk membuat dan/atau mengambil keputusan dan/atau tindakan dengan memperhatikan kepentingan para pihak secara keseluruhan tanpa ada diskriminasi.
- 4) Kecermatan, yaitu setiap kebijakan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dipersiapkan secara cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut dijalankan. Serta suatu keputusan dan/atau tindakan didasarkan pada kelengkapan informasi dan dokumen yang mendukung asas legalitas penetapan.
- 5) Tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu asas yang mewajibkan setiap instansi dan/atau pejabat pemerintah untuk tidak melampaui, menggunakan, atau

²²<https://katadata.co.id/agung/berita/6350013b8c7ea/memahami-8-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik>

Diakses pada tanggal 7/5/2023, pukul 19:55PM.

menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi, kepentingan golongan atau untuk kepentingan lain sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tersebut, dan / atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

- 6) Keterbukaan, yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- 7) Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum diatas kepentingan pribadi dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
- 8) Pelayanan yang baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas yang diketahui oleh masyarakat dengan mudah, sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan, serta sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan²³. Petugas yang ramah dengan menerapkan salam senyum sapa juga merupakan salah satu contoh pelayanan yang baik.

d. Urgensi Integritas PNS untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik.

Integritas merupakan keselarasan antara perkataan, pikiran, dan perbuatan hati nurani. Hal ini menunjukkan bahwa integritas harus dimiliki oleh setiap individu, terutama seorang pemimpin. Pemimpin yang berintegritas dapat meningkatkan kepercayaannya di mata orang-orang yang dipimpinnya serta akan dijadikan sebagai *role model* atau panutan. Selain itu, kepemimpinan yang berintegritas merupakan syarat utama dalam membangun SPIP (Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan).²⁴

Salah satu contoh orang yang integritasnya dipertanyakan, seperti kasus korupsi. Penyebab utama terjadinya korupsi merupakan hilangnya integritas pada diri seorang, dikarenakan tidak jujur dalam melakukan tugasnya. Padahal jujur merupakan salah satu ciri dari integritas. Dan apabila orang itu melakukan tindak korupsi maka integritasnya dipertanyakan. Oleh karena itu, apa yang kita katakan merupakan gambaran tentang diri kita. Orang yang berintegritas harus memiliki pribadi yang jujur dan berkarakter kuat.

Sebagai seorang ASN yang sangat terikat dengan sumpah dan janji ketika diucapkan saat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) juga terikat dengan Kode Etik yang diberlakukan di mana ia bekerja. Ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar kode etik, maka integritasnya di pertanyakan. Dan juga integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat erat hubungannya dengan tingkah laku

²³<https://heylawedu.id/blog/pelayanan-publik-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik>
Diakses pada tanggal 8/5/2023, pukul 8:45AM.

²⁴<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-dorong-instansi-bentuk-sistem-integritas-asn>. Diakses pada tanggal 7/5/2023, pukul 9:10 AM.

dan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS). Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib memiliki tujuh ciri-ciri prinsip kehidupan dalam masyarakat, yaitu tidak berpikir untuk sendiri, kepemimpinan, integritas, obyektif, bertanggung jawab, terbuka, dan kejujuran.

Secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), menyebutkan bahwa Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan tugas pembangunan tertentu, maka diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berintegritas, netral, profesional, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁵

Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki integritas dalam dirinya, agar tertanam keteguhan hati dan konsisten dalam menjunjung tinggi nilai luhur keyakinan. Ketika seseorang Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki integritas maka akan dapat memberikan kesan yang baik di hadapan masyarakat dan terutama di hadapan Allah SWT. Sebaliknya, ketika seseorang Aparatur Negeri Sipil (ASN) tidak memiliki integritas yang baik maka akan berpengaruh buruk bagi dirinya sendiri serta keluarganya.²⁶

Maka dari itu, urgensi integritas untuk mewujudkan pemerintah yang baik sangatlah penting, karena berintegritas merupakan bukan satu tujuan akan tetapi sebagai cara untuk mencapai atau mewujudkan suatu tujuan yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik.

Kesimpulan

Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa ASN harus memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas. *Mindset* bahwa ASN adalah pelayan masyarakat bukan minta untuk dilayani oleh masyarakat harus selalu diingatkan. ASN selaku aparatur pemerintah yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan penting untuk memiliki integritas tinggi serta memberikan pelayanan yang baik, jika tidak maka tujuan negara tidak akan tercapai. Pelayanan yang baik akan menjadi indikator bagi pemerintahan yang baik, jika pemerintahan yang baik maka kesejahteraan masyarakat pun akan tercapai.

²⁵Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia. *Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) Di Indonesia*, 4(1), 73-84

²⁶Nurprojo, I. S. (2014). Merit System dan Politik Birokrasi di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 8(1), 45-52.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Abdul, K. (2022). *Anti Korupsi dan Integritas*. Bandung: Penerbit CV. Media Sain Indonesia.
- Anwar, S. (2016). Teori Pertingkatan Norma dalam Usul Fikih. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50 (1).
- A. W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali.
- Endro. Gunardi. (2017). Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi. Universitas Bakrie. *Jurnal Integritas Volume 3, Nomor 1*.
- Garmo, John. (2013). *Pengembangan Karakter untuk Anak: Panduan Pendidik*. Jakarta: Penerbit Kesainc Blanc.
- Juwianto, Joko. (2014). *Penerima Layanan*. Jakarta: Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia. *Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) DiIndonesia*, 4(1),
- Mardapi, D. (2011). *Penilaian Pendidikan Karakter*. Bahan Tulisan Penilaian Pendidikan Karakter UNY. Yogyakarta.
- Nurprojo, I. S. (2014). Merit System dan Politik Birokrasi di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 8(1).
- U. Sutisna. Pengaruh Kewibawaan Guru PAI Terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK Al-Kautsar. *Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3, 92).
- SF. Marbun, (2011). "Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara", Yogyakarta: Liberty.
- Sulastri, S., & Simarmata, M. Y. (2019). Penanaman Nilai Pendidikan Karakter Jujur dalam Aspek Keterampilan Berbicara dan Menulis. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia II (Vol. 2, pp. 108-110)*. FBS Unimed Press.
- Susanty, Y. (2020). Penerapan Etika Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik*, 14(1).
- Suyono. (Juli 2022), *Kajian Literatur: Konsep Integritas Bagi ASN*. Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan, Vol 2, No. 3.
- Yuwono, I. D. (2013). *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Media Pressindo

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Berita Online

[Jam Kerja Keluyuran, 33 PNS Pemprov Kena Razia \(jpnn.com\)](#) diakses pada tanggal 28 Mei 2023

[Mitos dan Fakta Seputar PNS - Cek Fakta Liputan6.com](#) diakses pada tanggal 28 Mei 2023

<https://deepublishstore.com/blog/good-governance/> Diakses pada tanggal 7/5/2023, pukul 23:30PM.

<https://bobo.grid.id/read/083597792/5-ciri-dan-karakteristik-tata-kelola-pemerintahan-yang-baik?page=all>. Diakses pada tanggal 7/5/2023, pukul 17:15 PM.

<https://katadata.co.id/agung/berita/6350013b8c7ea/memahami-8-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik>

Diakses pada tanggal 7/5/2023, pukul 19:55PM.

<https://heylawedu.id/blog/pelayanan-publik-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik>

Diakses pada tanggal 8/5/2023, pukul 8:45AM.

<https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/kementerian-panrb-dorong-instansi-bentuk-sistem-integritas-asn>. Diakses pada tanggal 7/5/2023, pukul 9:10 AM.